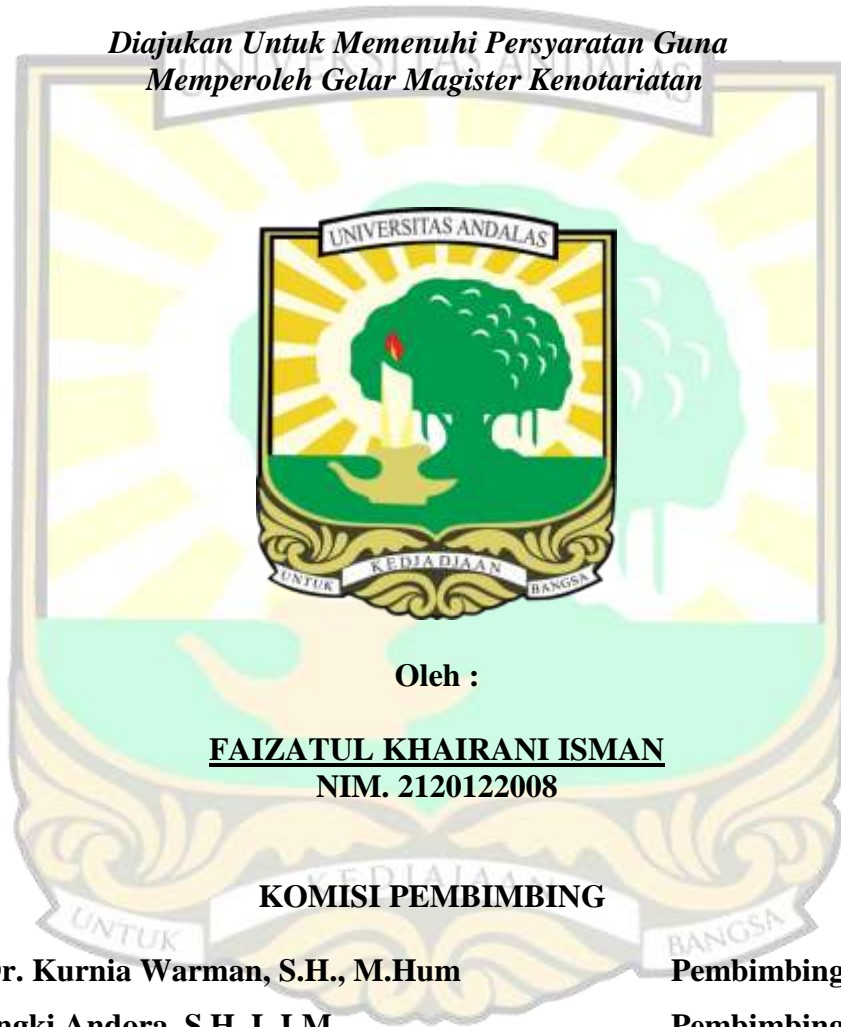


TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK  
DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG  
DI KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :

**FAIZATUL KHAIRANI ISMAN**  
NIM. 2120122008

**KOMISI PEMBIMBING**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**

**Pembimbing I**

**Dr. Hengki Andora, S.H.,L.LM**

**Pembimbing II**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM**

*Faizatul Khairani Isman, 2120122008, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Tahun 2023.*

## **ABSTRAK**

Kabupaten Agam adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun juga dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga pada awal mulanya masyarakat menempati suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mendaftarkan tanah mereka sebagai hak milik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menetapkan tanah masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan lindung padahal masyarakat telah dahulu memperoleh sertipikat hak milik terhadap lahan mereka, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah menjadi tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya. Penelitian ini mengajukan merumuskan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses perolehan tanah hak milik sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam? 2. Mengapa peralihan atau pemberian Hak Tanggungan di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam tidak bisa dilakukan? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa: 1. Masyarakat awalnya memperoleh tanah secara tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat sebagai hak milik dan pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tanah di kawasan lindung diberikan dengan batasan dan kewajiban berupa *Right, Restriction, and Responsibility* yang dicatat pada buku tanah dan sertipikat. 2. tidak bisa dilakukan peralihan dan/atau penjaminan yaitu berdasarkan: a. Pasal 38 UU Kehutanan, b. Pasal 103 ayat (1) PP Penyelenggara Kehutanan, c. Pasal 46 huruf c Perda RTRW Agam. 3. Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, preventif : pemberian surat keterangan status lahan, pendataan secara rutin, serta penyuluhan, represif, yaitu: pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau Penggunaan Kawasan Hutan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Milik, Kawasan Hutan Lindung

## **PROTECTION OF LEGAL RIGHTS OF PERSONS ABUSING PROPERTY RIGHTS IN PROTECTED FOREST AREAS IN AGAM DISTRICT**

*Faizatul Khairani Isman, 2120122008, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2023*

### **ABSTRACT**

*Agam district is one of the areas in Western Sumatra that has a fairly large forest area but also with population growth quite fast that at the beginning of the community occupied a forest area through the allocation of land and then given to the community and the community to register their land as property rights. As time passed, the government established the land as a protected forest area while the people had previously obtained certificates of ownership of their land, so that the people who had certified ownership rights on the land became unable to use their rights fully. This research proposes to formulate the problem: 1. How is the process of acquiring land rights before being determined as a forest protection area in the Agam District? 2. Why can't the transfer or granting of rights in the forest protection area in the Agam Prefecture be done? 3. How is the legal protection of land holders in the forest protected areas in the Agam District? This study uses the Yuridic-empirical approach. The results of the study show that: 1. The community initially acquired land in the form of land acquisition and then gave it to the community as property rights and land registration was carried out in accordance with the provisions of laws and laws as well as land in protective areas was granted with the limitations and obligations of Right, Restriction, and Responsibility recorded in the land book and certificates. It is not possible to make changes and/or guarantees based on: a. Section 38 of the Law, B. Article 103 (1) of the Constitution of the Russian Federation, c. 46 letter c of RTRW Agam. 3. Legal protection against holders of property rights within the protected forest area in the Agam district consists of two forms, namely preventive legal protection and repressive, preventive law protection: giving letters of evidence of the status of the land, depositing on a regular basis, as well as disbursement, repressive, that is: the expenditure of land in the forest area through the change of the boundaries of forest area, discharge through changes in the provision of forest areas and changes in forest area functions; providing access to forest management through social forestry programs; or use of forest land.*

*Keywords: Legal Protection, Ownership Rights, Protected Forest Areas*